



Judul : Kurikulum Perlu Penyederhanaan
Tanggal : Rabu, 24 Juni 2020
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Kurikulum Perlu Penyederhanaan

Praktik pembelajaran jarak jauh yang berlanjut pada tahun ajaran baru membuka wacana penyederhanaan kurikulum. Bahkan, muncul pula desakan perubahan kurikulum.

JAKARTA, KOMPAS — Dukungan terhadap wacana pemerintah untuk menyederhanakan kurikulum beserta kompetensi dasar siswa terus bergulir. Penyederhanaan kurikulum diharapkan bisa mempermudah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim menyampaikan hal itu saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (23/6/2020). Menurut Ramli, penyederhanaan kurikulum pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan berimplikasi pada penggabungan mata pelajaran yang relatif sama sehingga jumlah pelajaran yang diikuti siswa tidak terlalu banyak. Meski demikian, sekolah tetap diperbolehkan menambah mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan tenaga pendidik.

Dia mencontohkan, untuk tingkat SD, IGI mengusulkan penyesuaian atau penyederhanaan kurikulum mata pelajarannya menjadi beberapa butir, yaitu pendidikan karakter berbasis agama dan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Sains Dasar hasil gabungan IPA-IPS untuk kelas atas.

Untuk SMP, usulan mata pelajaran setelah ada penyesuaian atau penyederhanaan kurikulum meliputi Matematika, Bahasa Indonesia, Sains, Karakter dan Kultur Indonesia, serta Pendidikan Agama.

"Kami merasa kurikulum yang harus berubah maksimal adalah di SMP dengan SMA karena kebutuhan guru di SMP dan SMA terlalu besar karena jumlah mata pelajaran yang terlalu banyak," kata Ramli.

Siapkan bahan kurikulum

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad mengatakan, bahan-bahan kurikulum adaptif dengan PJJ akan tersedia pada Juli 2020 mendatang. Kemdikbud juga melakukan penyesuaian kompetensi dasar siswa agar tidak terlalu memberatkan guru.

Dia mencontohkan, kompetensi dasar bagi siswa kelas 3 SD terdiri dari 26, lalu disesuaikan dan diintegrasikan menjadi 16. Sebanyak 16 kompetensi dasar dianggap paling esensial.

Kemdikbud juga menyiapkan modul-modul pembelajaran yang bisa dipakai oleh siswa. Modul didesain ringkas dan bernas sehingga anak bisa menggunakannya ketika belajar mandiri.

"Kami juga menyiapkan materi-materi pembelajaran berwujud video yang bisa diakses oleh guru. Kami akan mengomunikasikan upaya ini kepada orangtua dan guru," ujar Hamid saat menghadiri webinar "Menyongsong Pendidikan Fase New Normal Covid-19, Akankah Mengubah Kurikulum Pendi-

dikan?", Senin (22/6), di Jakarta.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, sejak pembatasan sosial dan PJJ diberlakukan, Komisi X berharap agar Kemdikbud segera menyesuaikan kurikulum. Ada dua usulan yang disampaikan, yaitu kurikulum *ad hoc* dan pembaruan Kurikulum 2013 secara menyeluruh.

"Kami berharap, untuk tahun ajaran 2020/2021, Kemdikbud telah menyiapkan kurikulum *ad hoc*. Tidak mungkin diserahkan begitu saja kepada sekolah-sekolah. Pemerintah memang harus berperan," ujarnya.

Pengurus Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa Darmaningtyas berpendapat, Kurikulum 2013 sebaiknya dilaksanakan terlebih dulu. Setelah berjalan 10 tahun, pemerintah baru mengevaluasinya kembali. Apabila Kurikulum 2013 belum dilaksanakan secara penuh, lalu tiba-tiba ada perubahan, hal tersebut akan merepotkan pengawas, guru, orangtua, dan murid.

Darmaningtyas mengakui, Kurikulum 2013 memiliki kelemahan, antara lain strukturnya yang didominasi pelajaran-pelajaran normatif. "Apabila perubahan dilakukan sekarang, saya rasa kurang bijak. Kondisi peserta didik dan sekolah sangat beragam, dipengaruhi kondisi geografis, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan jaringan internet," ujarnya. (MED)